



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEPRIWANSYAH
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)
3. NHK : 456588

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	455.010.000
1. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KATINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 71.400.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 274 m2/36 m2 di KAB / KOTA KATINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 209.610.000		
3. Bangunan Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KATINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 152.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/80 m2 di KAB / KOTA KATINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
5. Tanah Seluas 609 m2 di KAB / KOTA KATINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	24.000.000
1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000		
2. MOTOR, HONDA SUPRA-X 125 Tahun 2011, HIBAH TANPA AKTA Rp. 4.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	9.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	88.365
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	488.598.365



III. HUTANG

Rp. 31.027.514

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 457.570.851

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.